

# Laporan Kinerja

## Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku

### 2022

Menuju Stabilitas Ekonomi  
Tetap Optimis & Waspada



## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) Papua, Papua Barat, dan Maluku Tahun Anggaran 2022 disusun dalam rangka merealisasikan pertanggungjawaban atas pencapaian target yang dibebankan kepada Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku selama tahun 2022. Laporan Kinerja dimaksud wajib dibuat oleh setiap instansi pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk kepatuhan kami terhadap peraturan yang dimaksud, sebagai alat kendali, alat penilai kinerja secara kuantitatif, dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku dalam rangka mewujudkan *good governance*, serta sebagai umpan balik guna lebih meningkatkan kinerja Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku dalam waktu mendatang. Selain itu, Laporan Kinerja ini berfungsi sebagai input bagi Kantor Pusat DJKN dalam rangka melaksanakan penilaian produktivitas kantor-kantor vertikal.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jayapura, Kepala KPKNL Biak, Kepala KPKNL Sorong, dan Kepala KPKNL Ambon beserta jajaran dan seluruh pegawai atas kerjasama dan kerja kerasnya dalam pengumpulan data dan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022 di lingkungan Kantor Wilayah DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku.

Kami harap Laporan Kinerja ini dapat memberikan informasi secara transparan, baik kepada Kantor Pusat DJKN maupun seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

Jayapura, 7 Februari 2023

Kepala Kantor Wilayah DJKN  
Papua, Papua Barat, dan  
Maluku



Nikodemus Sigit Rahardjo



# Daftar Isi

## Kata Pengantar

Kata Pengantar	i
----------------	---

## Pendahuluan

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	1
Sumber Daya Manusia	5
Sarana dan Prasarana	6
Peran Strategis	7
Permasalahan	8
Upaya Pemecahan Masalah	9

## Perencanaan Kinerja

Rencana Strategis	11
Penetapan Kinerja Tahun 2022	15



## **Akuntabilitas Kinerja**

Capaian Kinerja Organisasi 2022	17
Realisasi Anggaran	23



## **Penutup**

Penutup	24
---------	----



# BAB I | Pendahuluan



- A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- B. Sumber Daya Manusia
- C. Sarana dan Prasarana
- D. Peran Strategis
- E. Permasalahan
- F. Upaya Pemecahan Masalah

Suara burung Enggang yang menggelegar sebagai pertanda baik akan datangnya berkah. Seperti halnya Kemenkeu yang senantiasa memberikan harapan baik dan positif bagi perekonomian Indonesia.



# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja, Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku merupakan unit instansi vertikal DJKN yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara yang terdiri dari 1 jabatan struktural eselon II (kepala kantor), 6 jabatan eselon III, dan 15 jabatan eselon IV yang terdiri sebagai berikut.

1. Bagian Umum, mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, protokol, tata usaha, dan rumah tangga, serta penatausahaan, pengamanan, dan pengawasan barang milik negara di lingkungan kantor wilayah.
2. Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan dan akuntansi, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian di bidang kekayaan negara, serta pengoordinasian penatausahaan Barang Milik Negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di lingkungan Kantor Wilayah.
3. Bidang Penilaian, mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan laporan penilaian, penyusunan basis data penilaian, pembinaan, dan pengawasan terhadap penilai serta pelaksanaan kegiatan penilaian.
4. Bidang Piutang Negara, mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, penggalan potensi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan pengurusan piutang negara, pemberian bahan pertimbangan atas usul penghapusan piutang instansi pemerintah daerah, pertimbangan dan penetapan atas usul restrukturisasi piutang negara, pencegahan bepergian ke luar negeri, paksabadan atau penyelesaian piutang negara, pemblokiran surat berharga milik penanggung/penjamin hutang yang diperdagangkan di bursa efek, permintaan keterangan mengenai simpanan

nasabah debitur, serta penyiapan bahan penetapan persetujuan/penolakan keringanan hutang, bimbingan teknis pengelolaan barang jaminan, pemeriksaan harta kekayaan atau barang jaminan yang tidak ditemukan milik penanggung hutang atau penjamin hutang, penyiapan pengolahan data, monitoring pengurusan piutang negara, dan pelaksanaan verifikasi pengurusan piutang negara.

5. Bidang Pelayanan Lelang, mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, penggalan potensi dan pengembangan lelang serta verifikasi dan penatausahaan risalah lelang, pengawasan lelang, pelaksanaan pemeriksaan kinerja lelang dan pembukuan hasil lelang, pelaksanaan pengolahan data di bidang lelang, dan bimbingan terhadap Profesi Pejabat Lelang dan Jasa Lelang.
6. Bidang Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi, mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyiapan bahan rekomendasi perbaikan proses bisnis;
  - b. melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanaan penanganan perkara dan pemberian pendapat hukum (*legal opinion*), serta penyiapan bahan penyusunan rencana kerja, rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja, dan laporan tahunan; dan
  - c. melakukan penyiapan bahan perencanaan, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, jaringan, dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, pengawasan implementasi sistem aplikasi, penyiapan bahan penyajian informasi, dan hubungan kemasyarakatan.

Bagan Organisasi Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku saat ini dapat dilihat pada Bagan I.

### Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku



Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku mempunyai tugas untuk melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang yang semula meliputi 3 provinsi, sekarang menjadi 7 provinsi dikarenakan adanya pemekaran wilayah provinsi Papua dan provinsi Papua Barat. Adapun ketujuh provinsi dimaksud adalah:

1. Provinsi Papua;
2. Provinsi Papua Tengah (UU Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah);
3. Provinsi Papua Pegunungan (UU Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan);
4. Provinsi Papua Selatan (berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan);
5. Provinsi Papua Barat;
6. Provinsi Papua Barat Daya (UU Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya);

## 7. Provinsi Maluku.

Dalam melaksanakan tugas, Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku menyelenggarakan fungsi:

1. pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan di bidang kekayaan negara;
2. pemberian bimbingan teknis, supervisi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan di bidang penilaian;
3. pemberian bimbingan teknis, penggalan potensi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan piutang negara;
4. pemberian bahan pertimbangan atas usul penghapusan, keringanan hutang, pencegahan, paksa badan atau penyelesaian piutang negara;
5. pemberian bimbingan teknis pengelolaan barang jaminan dan pemeriksaan harta kekayaan atau barang jaminan yang tidak ditemukan milik penanggung hutang atau penjamin hutang;
6. pemberian bimbingan teknis, penggalan potensi, pemantauan, evaluasi dan verifikasi lelang serta pengembangan lelang;
7. pemberian pelayanan bantuan hukum di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;
8. pemberian bimbingan teknis pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan pelayanan informasi serta pelaksanaan verifikasi pengelolaan piutang negara dan lelang;
9. pembinaan terhadap Penilai, Usaha Jasa Lelang dan Profesi Pejabat Lelang;
10. pelaksanaan pengawasan teknis pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengelolaan piutang negara dan lelang;
11. pelaksanaan penilaian dan pengelolaan piutang negara; dan
12. pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah.

## B. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia berperan sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan di Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku. Jumlah pegawai di lingkungan Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku serta kantor operasional di bawahnya per tanggal 31 Desember 2022 berjumlah 39 pegawai dengan komposisi sebagai berikut :

### 1. Berdasarkan Golongan

Golongan	Ruang					Jumlah
	A	B	C	D	E	
II	2	0	11	0	0	13
III	5	4	7	4	0	20
IV	3	2	1	0	0	6
<b>Jumlah</b>	10	6	21	4	0	39

### 2. Berdasarkan Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Golongan Ruang				Jumlah
	I	II	III	IV	
D1	0	2	0	0	2
D3	0	9	0	0	9
S1/D4	0	0	18	0	18
S2	0	0	4	6	10
<b>Jumlah</b>	0	11	22	6	39

### 3. Tenaga Fungsional Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku

Unit Kerja	Jurusita	Pelelang	Pemeriksa	Penilai Pemerintah	Fungsional Penilai
Kanwil	5	4	3	4	0

### **C. SARANA DAN PRASARANA**

Dalam kegiatan operasionalnya Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku telah menempati Gedung Keuangan Negara Jayapura yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 08 Gurabesi, Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura. Sebelumnya beralamat di Jalan Raya Abepura Komplek Papua Trade Center (PTC), Kelapa Dua Kelurahan Entrop, Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua. Disamping itu, guna kelancaran tugas Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku juga ditunjang dengan sarana dan prasarana sebagai berikut:

1. kendaraan operasional sebanyak 6 (enam) unit minibus dan 2 (dua) unit sepeda motor dalam kondisi baik;
2. komputer (PC) sebanyak 20 (dua puluh) unit (18 unit dengan kondisi baik dan 2 unit dalam kondisi rusak ringan) dan laptop sebanyak 34 unit dalam kondisi baik;
3. ruang kerja yang ber-AC;
4. sarana penunjang lainnya berupa peralatan dan mesin; dan
5. rumah dinas 10 (sepuluh) unit dengan 6 (enam) unit dalam kondisi baik dan 4 (empat) unit dalam kondisi rusak ringan.

#### D. PERAN STRATEGIS

Sebagai organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi DJKN di bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, Pengurusan Piutang dan Pelayanan Lelang, Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku memiliki peran strategis sebagai berikut:

1. Melaksanakan Pengelolaan Kekayaan Negara

Peran Strategis Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku di bidang Pengelolaan Kekayaan Negara adalah mengoptimalkan Pengelolaan Kekayaan Negara yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna kekayaan negara yang difokuskan pada utilisasi kekayaan negara, pengamanan kekayaan negara, pembinaan dan penatausahaan kekayaan negara pada wilayah kerja Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku. Selain itu Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku juga memiliki tugas melaksanakan Penilaian Aset (BMN) yang berperan strategis untuk menyediakan informasi nilai wajar sekaligus analisis penggunaan tertinggi dan terbaik (*Highest and Best Use* atau HBU).

2. Memberikan pembinaan pelayanan Pengurusan Piutang Negara

Peran strategis Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku di bidang Pengurusan Piutang Negara adalah penyelamatan keuangan Negara yang dilakukan dengan mentransformasikan *Non Performing Loan* (NPL) menjadi aset yang lebih *liquid* dan berdaya guna untuk mendukung pembangunan melalui proses penagihan dan pengelolaan piutang macet yang berasal dari instansi pemerintah dan unit lain sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Memberikan pelayanan Lelang

Lelang berperan besar dalam menyediakan sarana transaksi penjualan aset secara umum. Dalam memberikan pelayanan lelang, Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku senantiasa mengupayakan penggalian lelang secara terus-menerus baik lelang eksekusi maupun lelang non-eksekusi sehingga lelang oleh KPKNL di wilayah kerja Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku senantiasa menjadi salah satu sarana jual beli yang diminati masyarakat dan juga menjadi

salah satu terobosan untuk ikut serta dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional. Lelang memiliki 3 peran dalam perekonomian nasional yaitu:

- a. membantu pemulihan keuangan negara dengan menegakkan hukum melalui penjualan barang rampasan, sitaan dan barang milik negara;
  - b. menyelesaikan kredit macet atau non performing loan (NPL) dengan tujuan untuk mendukung fungsi intermediasi perbankan, melalui pencairan agunan dengan penjualan lelang;
  - c. menggerakkan roda perekonomian dengan meningkatkan potensi nilai barang dan membuka lapangan pekerjaan.
4. Memberikan kontribusi pemasukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke kas Negara

Dalam memberikan pelayanan pengurusan piutang Negara, DJKN memperoleh hasil berupa biaya administrasi (biad) pengurusan Piutang Negara. Sedangkan dalam memberikan pelayanan lelang, DJKN memperoleh hasil bea lelang termasuk biad lelang yang selanjutnya disetorkan ke kas Negara sebagai PNBP.

## **E. PERMASALAHAN**

### 1. Permasalahan Internal:

- a. sumber Daya Manusia (SDM) Fungsional yang kurang memadai dari segi kuantitas untuk sebuah Kanwil DJKN yang mempunyai wilayah yang cukup luas (Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Barat, Papua Barat Daya, dan Maluku) dengan *stakeholder* yang cukup banyak;
- b. anggaran yang kurang memadai guna menunjang mobilitas maksimal/optimal dari jajaran Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku. Hal ini karena luas dan sulitnya medan kerja yang menjadi wilayah kerja Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku; dan
- c. sarana dan prasarana penunjang kinerja yang dirasa masih

kurang, seperti rumah dinas, kendaraan operasional, PC, Laptop dll.

2. Permasalahan Eksternal:

- a. kondisi alam yang berat dan luasnya wilayah kerja Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku yang sebagian besar hanya bisa ditempuh dengan alat transportasi laut atau udara. Selanjutnya, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Daya telah mengalami pemekaran sehingga wilayah kerja provinsi Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku bertambah yaitu Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Barat Daya;
- b. tingkat keamanan yang kurang kondusif di wilayah kerja Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku;
- c. adanya aturan atau regulasi lokal yang kurang mendukung tercapainya target kinerja Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku; dan
- d. mewabahnya pandemi *Covid-19* yang membatasi ruang gerak dari para pegawai Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku terlebih di KPKNL lingkup Kanwil dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

**F. UPAYA PEMECAHAN MASALAH**

1. Pemecahan Permasalahan Internal:

- a. telah diajukannya permohonan penambahan pegawai Fungsional ke kantor pusat DJKN serta mengirimkan pegawai Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku ke berbagai diklat dan sosialisasi/workshop. Selain itu untuk meningkatkan kualitas SDM Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku juga sering mengadakan sendiri sosialisasi dengan mendatangkan narasumber dari luar maupun narasumber dari internal;
- b. mengajukan permohonan penambahan pagu Anggaran pada saat penyusunan RKAKL atau melakukan penghematan anggaran; dan

- c. mengajukan permohonan penambahan Pagu Anggaran khususnya untuk jenis belanja modal dan belanja barang.

2. Pemecahan Permasalahan Eksternal

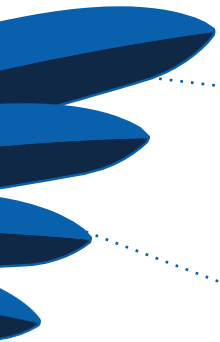
- a. mengajukan permohonan penambahan anggaran biaya perjalanan dinas, mengadakan acara/kegiatan kedinasan yang dipusatkan di satu tempat dan memanggil/mengumpulkan *stakeholder* di satu tempat;
- b. lebih selektif dalam mengadakan kegiatan/acara atau perjalanan dinas, dan berkoordinasi dengan aparat terkait untuk tugas-tugas yang mengandung resiko kerawanan tinggi;
- c. meningkatkan kemampuan para pegawai DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku khususnya yang pendatang (bukan Orang Asli Papua) untuk memahami/menyelami berbagai macam kearifan lokal yang ada di wilayah Papua, Papua Barat, dan Maluku; dan
- d. tetap mengedepankan protokol kesehatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, mengoptimalkan sarana digital dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut.

## BAB II | Perencanaan Kinerja



- A. Rencana Strategis
- B. Penetapan Kinerja Tahun 2022

Suara burung Enggang yang menggelegar sebagai pertanda baik akan datangnya berkah. Seperti halnya Kemenkeu yang senantiasa memberikan harapan baik dan positif bagi perekonomian Indonesia.



## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

### **A. RENCANA STRATEGIS**

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam suatu periode waktu dengan memperhatikan potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul. Perencanaan strategis DJKN disusun untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Diktum Kedua Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu setiap instansi pemerintah wajib menyusun rencana strategis untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis DJKN yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor : KEP-245/KN/2022 tanggal 29 Agustus 2022 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2022-2024. Rencana Strategis DJKN memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, DJKN berusaha memberikan pelayanan di bidang pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang yang profesional dan bertanggung jawab kepada masyarakat sesuai dengan **visi DJKN, yaitu "Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang profesional dan akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan : Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan serta untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat"**. Pengertian **profesional** dalam visi tersebut bermakna bahwa tugas-tugas pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang dilaksanakan sesuai standar profesi dan standar keilmuan yang telah ditetapkan. **akuntabel** artinya pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan

piutang negara, dan pelaksanaan lelang dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. **Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat** merupakan cita-cita dan arah dari tujuan akhir pengelolaan kekayaan negara sesuai dengan jiwa Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

### **1. Misi**

Sebagai wujud penjabaran visi yang telah dirumuskan tersebut, DJKN menetapkan 5 (lima) misi yaitu:

- a. mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;
- b. mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi dan hukum;
- c. meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;
- d. menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan; dan
- e. mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif, sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

### **2. Tujuan**

- a. Pengelolaan Kekayaan Negara yang lebih efisien dan efektif sertamemberi manfaat finansial dan sosial;
- b. pelayanan Lelang yang modern dan terpercaya;
- c. pelayanan Penilaian yang akuntabel dan efisien; dan
- d. birokrasi dan layanan publik DJKN yang *agile*, efektif, dan efisien.

### **3. Sasaran**

- a. mempercepat penyelesaian kasus Piutang Negara dan pencapaiantarget IKU;
- b. tercapainya mekanisme pengelolaan barang jaminan yang

- efektif, efisien dan terpercaya;
- c. meningkatkan kualitas Pelayanan Lelang;
  - d. meningkatkan pengelolaan data dan meminimalisasi perkara hukum;
  - e. melakukan Inventarisasi Kekayaan Negara secara menyeluruh, untuk meningkatkan manfaat dari kekayaan negara serta utilisasi kekayaan negara secara umum;
  - f. melaksanakan Penilaian Kekayaan Negara sehingga diketahui nilai riil kekayaan negara; dan
  - g. meningkatkan dukungan teknis dan administrasi Kanwil DJKN.

4. **Kebijakan dan Program Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku**

Dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menetapkan cara pencapaiannya melalui kebijaksanaan dan program.

a. Kebijakan

Kebijakan Pengurusan Piutang, Lelang, Kekayaan Negara dan Penilaian Kekayaan Negara telah ditetapkan meliputi:

- 1) peningkatan Pembinaan Pelayanan Pengurusan Piutang Negara;
- 2) peningkatan pengawasan dan pembinaan kualitas Pelayanan Lelang;
- 3) peningkatan kualitas, pengawasan, dan pembinaan dalam Pengelolaan Kekayaan Negara;
- 4) peningkatan pengawasan dan pembinaan kualitas dalam Pelayanan Penilaian;
- 5) peningkatan kualitas penyajian informasi dan pengoptimalisasi penanganan perkara; dan
- 6) melaksanakan cara kerja *New Normal* dalam melaksanakan tugas (rapat daring, WFO, WFH, dan WFHB).

b. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Kebijakan yang dijalankan oleh Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku diuraikan dalam program sebagai berikut :

- 1) percepatan pelayanan Pengurusan Piutang Negara;
- 2) percepatan pelayanan Lelang;
- 3) mengoptimalkan sistem administrasi data Pengelolaan Kekayaan negara, Piutang, dan Lelang;
- 4) mengoptimalkan upaya penyelesaian Perkara;
- 5) pelayanan di Bidang Umum yang meliputi: Kepegawaian, Keuangan, dan TURT;
- 6) tertib administrasi BMN;
- 7) optimalisasi utilisasi kekayaan negara; dan
- 8) Penilaian BMN.

## B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2022

Penetapan Kinerja Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku tahun 2022 sesuai dengan Peta Strategis Kemenkeu Two terdiri dari 12 Sasaran Strategis (SS) dan 21 Indikator Kinerja Utama (IKU). Rincian selengkapnya tentang SS dan IKU tahun 2022 adalah berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	
			Kuantitas/Output	Kualitas/Mutu
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100	100
		Persentase produktivitas lelang	36	100
		Tingkat keberhasilan joint program pelaksanaan RCE dan pengembangan UMKM	80	100
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100	100
		Persentase Penurunan <i>Outstanding</i> Piutang Negara	100	100
3	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kanwil dan KPKNL	4.5	100
4	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	65	100
		Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	100	100
		Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100	100
		Persentase Implementasi Evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	100	100
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	19	100

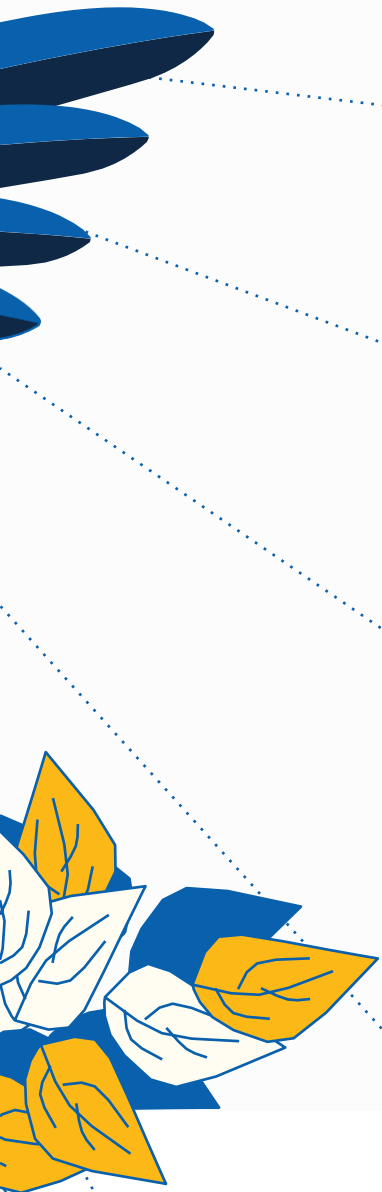
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	
			Kuantitas/Output	Kualitas/Mutu
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	Persentase pelaksanaan lelang <i>e-auction</i> dan <i>e-conventional auction</i>	92	100
		Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	10	100
7	Edukasi yang Efektif	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	92	100
8	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	85	100
		Persentase rekomendasi hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti		
9	SDM yang Kompeten	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100	100
10	Organisasi yang <i>Fit For Purpose</i>	Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI menuju WBK/WBBM (target sesuai status, pilih salah satu)	75	100
		Nilai review pengelolaan kinerja	80	100
11	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95.5	100
12	Penguatan Tata Kelola Kehumasan dalam Ekosistem Kolaboratif	Indeks Efektivitas ekosistem kehumasan	3.55	100

## BAB III | Akuntabilitas Kinerja



- A. Capaian Kinerja Organisasi 2022
- B. Realisasi Anggaran

Suara burung Enggang yang menggelegar sebagai pertanda baik akan datangnya berkah. Seperti halnya Kemenkeu yang senantiasa memberikan harapan baik dan positif bagi perekonomian Indonesia.



## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 2022

Kode	IKU	V/C	target Q4	realisasi Q4	Bobot Awal	Bobot Akhir IKU	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%	Keterangan
	Stakeholder Perspective(25%)							30.00%	
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian							120.00%	
1a-CP	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	P/M	100%	155.68%	14%	33%	155.68%	120.00%	hijau
1b-CP	Persentase produktivitas lelang	P/M	36%	56.85%	14%	33%	157.92%	120.00%	hijau
1c-N	Tingkat keberhasilan joint program pelaksanaan RCE dan pengembangan UMKM	P/M	80%	100.00%	14%	33%	125.00%	120.00%	hijau
	Customer Perspective(15%)							17.06%	
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							120.00%	
2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	P/M	100%	213.66%	14%	50%	213.66%	120.00%	hijau
2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	P/M	100%	181.07%	14%	50%	181.07%	120.00%	hijau
3	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi							107.47%	
3a-N	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kanwil dan KPKNL	E/M	4.50	4.84	21%	100%	107.47%	107.47%	hijau
	Internal Process Perspective (30%)							34.14%	
4	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							118.22%	
4a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	P/M	65%	75%	14%	24%	116.00%	116.00%	hijau
4b-CP	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	P/L	100%	117.52%	19%	33%	117.52%	117.52%	hijau
4c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	P/M	100%	129.41%	14%	24%	129.41%	120.00%	hijau
4d-N	Persentase Implementasi Evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	P/H	100%	120.63%	11%	19%	120.63%	120.00%	hijau
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							120.00%	
5a-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	P/M	19%	1.04%	14%	100%	194.53%	120.00%	hijau
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							114.35%	
6a-N	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	P/M	92%	100.00%	14%	50%	108.70%	108.70%	hijau
6b-N	Deviasi Data PNPB Fungsional DJKN	P/M	10%	0.00%	14%	50%	200.00%	120.00%	hijau
7	Edukasi yang Efektif							106.89%	
7a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	P/M	92.00	98.34	14%	100%	106.89%	106.89%	hijau
8	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif							109.57%	
8a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	P/M	85%	93.14%	14%	100%	109.57%	109.57%	hijau
8b-N	Persentase rekomendasi hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti	P/M							abu-abu
	Learning & Growth Perspective (30%)							33.90%	
9	SDM yang Kompeten							120.00%	
9a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	P/M	100%	120.00%	14%	100%	120.00%	120.00%	hijau
10	Organisasi yang Fit For Purpose							119.19%	
10a-N	Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI menuju WBK/WBBM (target sesuai status, pilih salah satu)	P/M	75	95.64	14%	50%	127.52%	120.00%	hijau
10b-N	Nilai review pengelolaan kinerja	P/M	80	94.70	14%	50%	118.38%	118.38%	hijau
11	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal							101.83%	
11a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	P/M	95.5%	97.25%	14%	100%	101.83%	101.83%	hijau
12	Penguatan Tata Kelola Kehumasan dalam Ekosistem Kolaboratif							110.99%	
12a-N	Indeks Efektivitas ekosistem kehumasan	P/M	3.55	3.94	14%	100%	110.99%	110.99%	hijau
<b>Nilai Kinerja Organisasi (NKO)</b>								<b>115.10%</b>	<b>hijau</b>

Berdasarkan hasil pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu Two Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku tahun 2022 sebagaimana diatas, maka untuk evaluasi dan analisis kinerja dapat dirinci sebagai berikut.

**SS 1: Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian**

1. Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang 155.68%;
2. Persentase produktivitas lelang 56.85%;
3. Tingkat keberhasilan joint program pelaksanaan RCE dan pengembangan UMKM 100.00%.

Realisasi penerimaan negara dan pengelolaan kekayaan negara dan lelang pada tahun 2022 sebesar Rp50.031.091.093,- atau sebesar 155.68% dari target yang ditetapkan sebesar Rp32.136.350.478,- . Salah satu penyumbang PNBPN berasal dari penyelesaian sebagian Aset Eks *Irian Jaya Joint Development Foundation* (IJJDF) yang hanya dikelola oleh Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku sebesar Rp445.000.000 atas aset yang berada di Jalan Hom-Hom Wamena

**SS 2: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa**

1. Persentase Realisasi Pokok Lelang 213.66%;
2. Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara 181.07%.

Realisasi Persentase Realisasi Pokok Lelang sebesar 213.66% atau sebesar Rp801.227.257.205,- dari Target sebesar Rp375.000.000.000,- tersebut dapat tercapai karena pelaksanaan penggalian potensi dan edukasi kepada masyarakat tentang manfaat dan kelebihan lelang.

### **SS 3: Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi**

1. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kanwil dan KPKNL 4.84.

Realisasi indeks kepuasan pelanggan layanan Kanwil dan KPKNL pada tahun 2022 sebesar 4.84 dari target yang telah ditetapkan sebesar 4.50. Hasil ini diperoleh berdasarkan hasil survei internal yang telah dilakukan dan penyebaran kuesioner terhadap *stakeholder*, dimana hasilnya menunjukkan tren positif dengan meningkatnya tingkat kepuasan *stakeholder* terhadap pelayanan yang dilakukan kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku.

### **SS 4: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal**

1. Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK 75.40%;
2. Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan 117.52%;
3. Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) 129.41%;
4. Persentase Implementasi Evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) 120.63%.

Tahun 2022 IKU dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal semuanya mencapai target bahkan melampaui target, hal ini disebabkan realisasi:

- a. pemahaman yang baik oleh satker tentang pentingnya pengelolaan BMN secara tertib khususnya terhadap BMN berupa tanah;
- b. terjalinnya koordinasi dan komunikasi yang baik antara Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku serta KPKNL dengan Satker-satker dalam hal kerjasama pengelolaan BMN secara tertib;
- c. segala permasalahan dapat dimitigasi dengan baik oleh Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku.

### **SS 5: Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional**

1. Deviasi ketergunaan hasil penilaian 1.04%.

Tahun 2022 IKU dari Deviasi ketergunaan hasil penilaian mendapatkan capaian 1,04% dari target sebesar 19%. IKU ini merupakan jenis IKU minimize dimana semakin rendah persentase capaian, maka semakin tinggi hasil capaian yang diperoleh.

#### **SS 6: Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif**

1. Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction 100.00%;
2. Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN 0%.

Pada tahun 2022 realisasi dari persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction 100.00% dan realisasi deviasi data PNBPN Fungsional DJKN sebesar 0%. IKU ini juga merupakan IKU minimize.

#### **SS 7: Edukasi yang Efektif**

1. Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi 98.34%.

Pada tahun 2022 realisasi dari tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi sebesar 98.34% dari target yang ditetapkan sebesar 92%.

#### **SS 8: Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif**

1. Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara 93.14%;
2. Persentase rekomendasi hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti.

Pada tahun 2022 realisasi dari persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara pada tahun 2022 terealisasi 93.14% dari target 85%.

## **SS 9: SDM yang Kompeten**

1. Persentase pengembangan kompetensi pegawai 120.00%.

Realisasi dari persentase pengembangan kompetensi pegawai mencapai 120% dari target sebesar 100%, hal ini terjadi karena pengelolaan kinerja pada Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku berbasis BSC. Capaian ini menunjukkan perhatian yang tinggi dari Kepala Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku terhadap kebutuhan pegawai yang mempunyai kemampuan dan keahlian tinggi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaannya, dibuktikan dengan banyaknya dan seringnya pegawai ditugaskan untuk mengikuti berbagai diklat dan sosialisasi.

## **SS 10: Organisasi yang *Fit For Purpose***

1. Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI menuju WBK/WBBM 95.64;
2. Nilai review pengelolaan kinerja 94.70.

Realisasi dari Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI menuju WBK/WBBM di tahun 2022 tercapai sebesar 95.64 dari target 75. Keberhasilan ini merupakan wujud Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku untuk membangun Zona Integritas serta memberikan pelayanan yang terbaik dan bebas korupsi kepada *stakeholder*.

## **SS 11: Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal**

1. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran 97.25%

Persentase kualitas pelaksanaan anggaran pada tahun 2022 terealisasi sebesar 97.25% dari target 95.5%.

## SS 12: Penguatan Tata Kelola Kehumasan dalam Ekosistem Kolaboratif

1. Indeks Efektivitas ekosistem kehumasan 3.94.

Realisasi Indeks efektivitas ekosistem kehumasan pada tahun 2022 sebesar 3.94, lebih besar dari target yang ditetapkan sebesar 3.55.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku pada tahun 2022 ini adalah **istimewa** dan mendapatkan predikat capaian tertinggi kedua diantara seluruh Kanwil DJKN. Adapun perbandingan capaian kinerja organisasi pada Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku dalam kurun waktu 4 (empat) tahun dibandingkan dengan anggaran yang tersedia adalah sebagai berikut.

Tahun	Pagu Anggaran	Persentase Realisasi Anggaran	Target NKO	Capaian NKO
2019	Rp5,577,980,000	99,01%	100%	113.89%
2020	Rp4,754,620,000	98,27%	100%	110.05%
2021	Rp2,307,929,000	97,23%	100%	113.51%
2022	Rp1,935,303,000	97,25%	100%	115.10%

Capaian yang diraih oleh Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku dalam waktu 4 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Hal tersebut dikarenakan adanya adanya pandemi Covid-19 yang membuat capaian pada 2020 mengalami penurunan. Namun, pada tahun 2021 dan 2022 mengalami perbaikan seiring membaiknya pertumbuhan ekonomi masyarakat dan kerja keras Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku dan para *stakeholder*. Meskipun dengan hambatan dalam mencapai target kinerja, seluruh jajaran Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku tetap memberikan kinerja terbaik sehingga mendapatkan capaian yang maksimal.

Guna menunjang kinerja Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku, berbagai inovasi layanan juga disusun agar memberikan kemudahan menjangkau *stakeholder*. Adapun beberapa inovasi layanan yaitu:

1. layanan pengaduan melalui media aplikasi *whatsapp* dan *google sheet*;
2. layanan *chatbot* NokenAle; dan
3. dashboard yang memberikan data capaian kinerja.

Selanjutnya, pada tahun 2022 Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku juga memperoleh predikat Zona Integritas-Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK). Hal tersebut tercapai karena kinerja dan komitmen seluruh jajaran Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku untuk memberikan pelayanan kepada *stakeholder* dengan berlandaskan integritas. Selanjutnya, tentu saja Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku akan berusaha mempertahankan predikat ZI-WBK dan mempersiapkan diri untuk pembangunan ZI-WBBM.

## **B. REALISASI ANGGARAN**

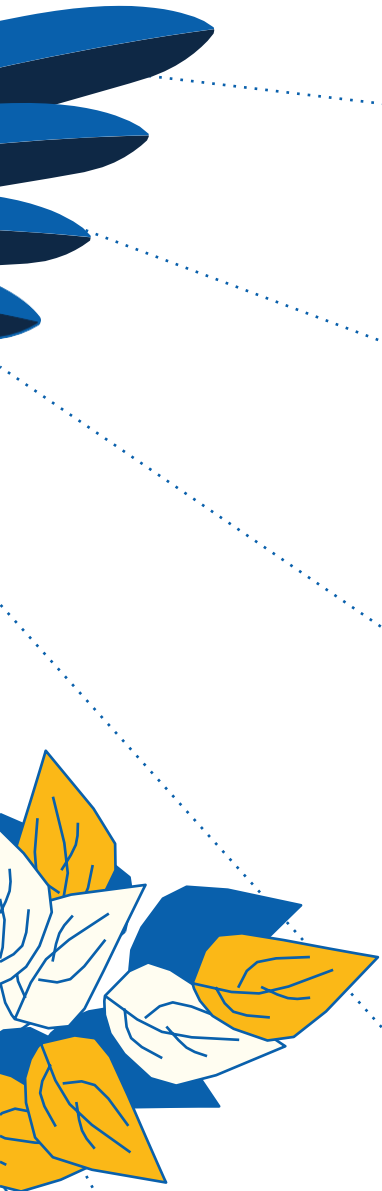
Realisasi anggaran Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku di tahun 2022 adalah sebesar Rp1.814.060.134,- atau 94% dari Pagu yang disediakan sebesar Rp1.935.303.000,-. Pada tahun 2023 Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku mendapat alokasi pagu DIPA sebesar Rp3.096.802.000,- yang terdiri dari belanja barang Rp2.108.800.000,- belanja modal Rp988.002.000,-.



# BAB IV | Penutup



Suara burung Enggang yang menggelegar sebagai pertanda baik akan datangnya berkah. Seperti halnya Kemenkeu yang senantiasa memberikan harapan baik dan positif bagi perekonomian Indonesia.



## **BAB IV PENUTUP**

Capaian Kinerja Kantor Wilayah DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku selama tahun 2022 merupakan capaian yang istimewa dengan NKO sebesar 115,10%. Hal ini bisa dilihat dari capaian yang diraih selama tahun 2022 dimana 20 IKU yang dimiliki Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku, semua IKU dapat tercapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan (hijau). Capaian NKO Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku tersebut, merupakan capaian tertinggi kedua dari seluruh Kanwil DJKN. Prestasi yang dicapai pada tahun 2022 ini, tidak terlepas dari makin dihayati dan dilaksanakannya nilai-nilai Kementerian Keuangan oleh seluruh jajaran Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku termasuk jajaran KPKNL di bawahnya.

Adanya masalah/kendala dalam pelaksanaan tugas sebagaimana diuraikan pada BAB I, bukan menjadi alasan bagi kami untuk tidak berbuat yang terbaik bagi organisasi, yaitu dengan bekerja lebih giat serta terus menerus membangun semangat nilai-nilai Kementerian Keuangan untuk menjadi karakter kinerja seluruh pegawai. Kami akan berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan prestasi/capaian kinerja yang sudah baik dan terus berusaha untuk meningkatkannya.

**LAMPIRAN LAPORAN KINERJA  
KANTOR WILAYAH DJKN PAPUA, PAPUA BARAT, DAN MALUKU  
TAHUN 2022**



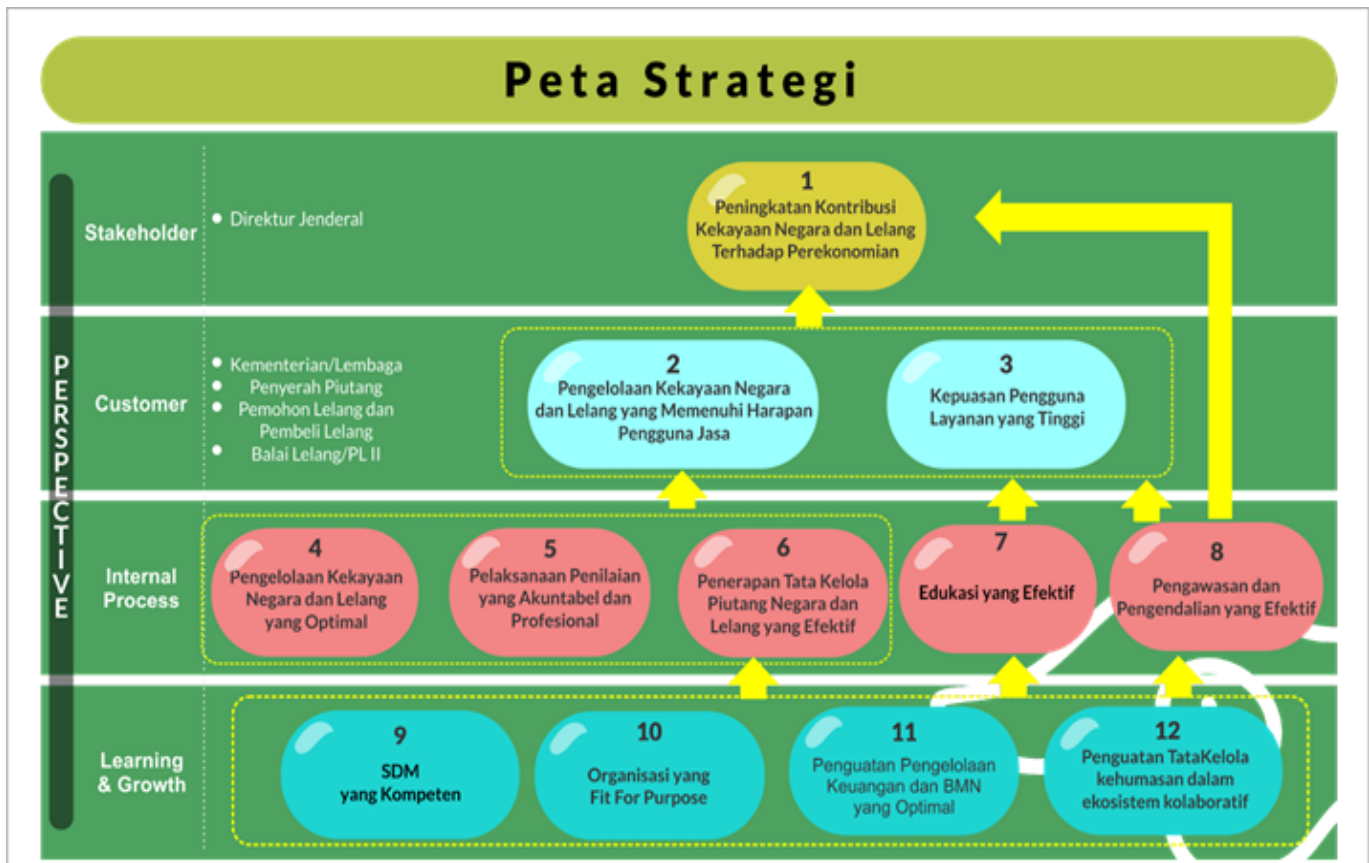
**KONTRAK KINERJA  
NOMOR: 29/KN/2022  
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL  
KEKAYAAN NEGARA PAPUA, PAPUA BARAT, DAN MALUKU  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2022**

**Pernyataan Kesanggupan**

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**Peta Strategi**



Kontrak kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA PAPUA,**  
**PAPUA BARAT, DAN MALUKU**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian	1a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%
		1b-CP Persentase Produktivitas Lelang	36%
		1c-N Tingkat Keberhasilan <i>Joint Program</i> Pelaksanaan RCE dan Pengembangan UMKM	80%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%
		2b-CP Persentase Penurunan <i>Outstanding</i> Piutang Negara	100%
3	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi	3a-N Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kanwil dan KPKNL	4,50
4	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	4a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	65%
		4b-CP Persentase Bidang Tanah yang Disertifikatkan	100%
		4c-CP Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%
		4d-N Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	5a-CP Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	19%
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	6a-N Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	92%
		6b-N Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	10%
7	Edukasi yang Efektif	7a-N Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi	92
8	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	8a-CP Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara	85%
9	SDM yang Kompeten	9a-N Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100%
10	Organisasi yang Fit For Purpose	10a-N Nilai Pemenuhan Unit Kerja Terhadap Kriteria ZI Menuju WBK	75

Kontrak kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
		10b-N	Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	80
11	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal	11a-CP	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5%
12	Penguatan Tata Kelola Kehumasan dalam Ekosistem Kolaboratif	12a-N	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	3,55

Kegiatan	Anggaran
<b>Pengelolaan Perbendaharaan , Kekayaan Negara dan Risiko</b>	<b>Rp 815.773.000,00</b>
1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp 27.795.000,00
2. Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	Rp 16.688.000,00
3. Pengelolaan Aset	Rp 771.290.000,00
<b>Dukungan Manajemen</b>	<b>Rp 1.165.362.000,00</b>
1. Legislasi dan Litigasi	Rp 10.584.000,00
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp 1.131.874.000,00
3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp 12.320.000,00
4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp 10.584.000,00

Jakarta, 31 Januari 2022

Direktur Jenderal Kekayaan Negara



Ditandatangani Secara Elektronik  
Rionald Silaban

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan  
Negara Papua, Sulawesi Tengah, dan Maluku



Ditandatangani Secara Elektronik  
Nikodemus Sigit Rahardjo



**RINCIAN TARGET KINERJA**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA PAPUA,**  
**PAPUA BARAT, DAN MALUKU**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2022**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian							
1a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
1b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	20%	25%	25%	30%	30%	36%	36%
1c-N	Tingkat Keberhasilan Joint Program Pelaksanaan RCE dan Pengembangan UMKM	-	-	-	-	-	80%	80%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	20%	40%	40%	70%	70%	100%	100%
2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
3	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi							
3a-N	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kanwil dan KPKNL	-	-	-	-	-	4,50	4,50
4	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							
4a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	-	50%	50%	55%	55%	65%	65%
4b-CP	Persentase Bidang Tanah yang Disertifikatkan	20%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
4d-N	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	10%	40%	40%	75%	75%	100%	100%
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							
5a-CP	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							



Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
6a-N	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%
6b-N	Deviasi Data PNPB Fungsional DJKN	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
7	Edukasi yang Efektif							
7a-N	Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi	-	92	92	-	92	92	92
8	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif							
8a-CP	Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara	-	40%	40%	-	40%	85%	85%
9	SDM yang Kompeten							
9a-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	15%	40%	40%	75%	75%	100%	100%
10	Organisasi yang Fit For Purpose							
10a-N	Nilai Pemenuhan Unit Kerja Terhadap Kriteria ZI Menuju WBK	-	-	-	-	-	75	75
10b-N	Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	-	-	-	-	-	80	80
11	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal							
11a-CP	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5%	95,5 %	95,5 %	95,5 %	95,5 %	95,5%	95,5%
12	Penguatan Tata Kelola Kehumasan dalam Ekosistem Kolaboratif							
12a-N	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	-	3,55	3,55	-	3,55	3,55	3,55

PNS yang dinilai,



Ditandatangani Secara Elektronik  
Nikodemus Sigit Rahardjo



**INISIATIF STRATEGIS**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA PAPUA, PAPUA BARAT, DAN MALUKU**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2022**

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Anggaran
				Kegiatan	Output			
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negaradan Lelang Terhadap Perekonomian/ Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negaradan Lelang	Kompetisi Inovasi Manajer Aset (KOIN MAS) DJKN	Jumlah aset yang diberdayakan dan memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada masyarakat	Q1: Inventarisasi terhadap aset yang akan diberdayakan/dimanfaatkan	Daftar Aset yang akan diberdayakan/dimanfaatkan	Q1 s.d. Q4	Bidang/Seksi PKN	-
				Q2: Pelaksanaan Monitoring Kegiatan	Q2: Laporan Kegiatan Monitoring			
				Q3: Pelaksanaan Monitoring Kegiatan	Q3: Laporan Kegiatan Monitoring			
				Q4: Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Q4: Laporan Hasil Evaluasi Kegiatan			

PNS yang dinilai,



Ditandatangani Secara Elektronik  
 Nikodemus Sigit Rahardjo



## Sasaran Kerja Pegawai

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN

1 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2022

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Nikodemus Sigit Rahardjo	NAMA	Rionald Silaban
NIP	197209021993011001	NIP	196604231990101001
PANGKAT/GOL RUANG	Pembina Tingkat I, IV/b	PANGKAT/GOL RUANG	Pembina Utama, IV/e
JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku	JABATAN	Direktur Jenderal Kekayaan Negara
UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku	UNIT KERJA	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

NO	RENCANA KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>A. KINERJA UTAMA</b>			
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%
2	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian	Persentase Produktivitas Lelang	36%
3	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian	Tingkat Keberhasilan <i>Joint Program</i> Pelaksanaan RCE dan Pengembangan UMKM	80%
4	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%
5	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	Persentase Penurunan <i>Outstanding</i> Piutang Negara	100%
6	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kanwil dan KPKNL	4,50
7	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	65%
8	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	Persentase Bidang Tanah yang Disertifikatkan	100%
9	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%
10	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%
11	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	19%

Kontrak kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan



12	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	92%
13	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	10%
14	Edukasi yang Efektif	Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi	92
15	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara	85%
16	SDM yang Kompeten	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100%
17	Organisasi yang Fit For Purpose	Nilai Pemenuhan Unit Kerja Terhadap Kriteria ZI Menuju WBK	75
18	Organisasi yang Fit For Purpose	Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	80
19	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5%
20	Penguatan Tata Kelola Kehumasan dalam Ekosistem Kolaboratif	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	3,55

B. KINERJA TAMBAHAN			
1	Pengembangan <i>Regional Ministry of Finance Data Analytic Community</i> pada Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku	Terbentuknya <i>Dashboard</i> Pemantauan BMN, Piutang Negara, dan Lelang pada Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku	100%

Pegawai yang dinilai,



Ditandatangani Secara Elektronik  
Nikodemus Sigit Rahardjo  
NIP 197209021993011001

Jakarta, 31 Januari 2022

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik  
Rionald Silaban  
NIP 196604231990101001

